



DISWAY

Oleh: Dahlan Iskan



ILUSTRASI Catatan Dahlan Iskan tentang Kuasa Tambang.--

Kuasa Tambang

SAYA dianggap kurang imbang dalam membaca pasal 33 UUD 1945. Begitulah salah satu reaksi atas tulisan saya di Disway Senin kemarin. Yang menilai itu seorang pengusaha besar yang bergerak di bidang pertambangan.

Harusnya, kata pengusaha itu, saya membaca juga ayat lima (5) pasal 33 itu: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang".

UU yang mengatur pelaksanaan pasal 33 itu sudah ada. Yakni UU Minerba. Semua aspek pertambangan diatur di situ.

■ Bersambung ke Hal.2

KEPALA BGN DIBERHENTIKAN MENDADAK

PAGI DAMPINGI PRABOWO, MALAM DICOPOT

JAKARTA -GP- Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Dadan Hindayana dari posisi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) per 2 Juni 2026. Kabar pencopotan pimpinan lembaga strategis ini disampaikan langsung oleh pihak Istana dalam konferensi pers mendadak di Jakarta.

■ Bersambung ke Hal.2



Salurkan Infak Dan Waqaf Terbaik Kita Untuk Pembangunan

GORONTALO ISLAMIC CENTRE

DI BANK MUAMALAT

NO REK : 8120999999

LAPORAN KEUANGAN
MASJID RAYA- GORONTALO ISLAMIC CENTRE

Saldo tanggal 13 Maret 2026

Bank Muamalat	Rp 2.981.088.175
Bank BSG	Rp 255.174.632
Total Saldo	Rp 3.236.182.807
Total Pembiayaan Saldo setelah dikurangi pengeluaran sejak 7/1/26 s.d 13 Maret 2026	Rp 97.371.228

Terdalam Secara Nasional **MEI, GORONTALO ALAMI DEFLASI**

GORONTALO -GP- Pusat Statistik mencatat inflasi per Mei 2026. Tercatat sebanyak 31 provinsi mengalami inflasi sementara ada 7 provinsi mengalami deflasi. Gorontalo menjadi provinsi dengan deflasi terdalam mencapai sebesar 0,96 persen (month-to-month). Sementara Maluku menjadi wilayah dengan inflasi tertinggi mencapai 0,93 persen (month-to-month).



Agus Sudibyo

■ Bersambung ke Hal.2

Israel Bakal Larang Adzan di Masjid Al Aqsa

JAKARTA -GP- Khatib Masjid Al-Aqsa di wilayah pendudukan Yerusalem Timur memperingatkan bahaya besar dari rancangan undang-undang (RUU) terbaru Israel yang sengaja dirancang untuk melegalkan pelarangan berkumandangnya azan bagi umat Muslim.

■ Bersambung ke Hal.2

WAGUB GORONTALO IDAH TINJAU LOKASI KUNJUNGAN PESERTA PENAS XVII

Bukti Produk Pertanian Gorontalo Miliki Daya Saing dan Pasar Menjanjikan

(FOTO: NOVA DISKOMINFO)

WAGUB Idah juga mengunjungi lokasi kelompok nelayan budidaya ikan nila sistem bioflok di Desa Lupoyo, Kecamatan Limboto, yang dipersiapkan untuk menyambut peserta PENAS Tani dan Nelayan.



WAKIL Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, meninjau tiga lokasi yang akan menjadi tujuan kunjungan peserta Pekan Nasional (PENAS) Tani dan Nelayan ke XVII di Kabupaten Gorontalo, Selasa (2/6/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi sekaligus mengevaluasi berbagai aspek yang perlu disempurnakan agar potensi unggulan pertanian dan perikanan Gorontalo dapat ditampilkan secara optimal kepada peserta PENAS dari seluruh Indonesia.

DALAM kunjungan tersebut, Wagub Idah didampingi jajaran Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Parekrafpora Provinsi Gorontalo. Tiga lokasi yang ditinjau meliputi Kelompok Tani Lamuta yang fokus pada pertanian organik di Desa Hutano, Kecamatan Limboto Barat, kelompok tani kacang tanah yang bermitra dengan PT Garuda Food di Kelurahan Tilihuwa, Kecamatan Limboto, serta

kelompok nelayan budidaya ikan nila sistem bioflok di Desa Lupoyo, Kecamatan Limboto.

Pada lokasi pertama, Wagub mengapresiasi pengembangan pertanian organik yang dinilai mampu menjadi contoh penerapan pertanian ramah lingkungan sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.

■ Bersambung ke Hal.2

Pagi Dampingi Prabowo, Malam Dicopot

dari halaman 1

“Pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, dalam jumpa pers di Kantor Presiden RI, Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa malam. Selanjutnya, posisi Dadan digantikan oleh Nanik Suryati Dayang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN.

Dadan, yang pada Selasa pagi masih menjabat Kepala BGN turut mendampingi Presiden Prabowo mengecek operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Palmerah, Jakarta Barat. Selepas itu, Prabowo juga mengecek pelaksanaan MBG di SMPN 111 Jakarta.

Dadan, yang merupakan ahli bidang serangga dari Institut Pertanian Bogor, resmi menjabat sebagai Kepala BGN oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor: 94B Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Dadan dilantik pada 19 Agustus 2024 bersama dengan para

pejabat negara lainnya pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Dadan melanjutkan jabatannya sebagai Kepala BGN pada masa pemerintahan Presiden Prabowo hingga 2 Juni 2026. BGN dibentuk untuk melaksanakan salah satu program prioritas pemerintah, yakni MBG, yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024.

MBG sendiri adalah program penyediaan makanan sehat dan bergizi untuk siswa sekolah, balita serta ibu hamil dan menyusui. Program itu mulai berjalan sejak 6 Januari 2025.

PEROMBAKAN PIMPINAN BGN

Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru untuk menggantikan Dadan Hindayana. Mensesneg Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden juga merombak jajaran pimpinan BGN dengan menunjuk Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru, menggantikan Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya.

“Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat saudara Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Prasetyo menyampaikan Presiden Prabowo juga mengangkat Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN yang baru menggantikan Lodewijk Pusung serta Mayor Jenderal TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru menggantikan Sony Sonjaya. Dia mengatakan keputusan pergantian pimpinan BGN tersebut diambil Presiden setelah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja lembaga itu selama kurang lebih 1,5 tahun. Menurut dia, dalam menjalankan tugas sehari-hari, Presiden terus memantau dan mengevaluasi kinerja seluruh kabinet, termasuk BGN serta menerima berbagai masukan dari kementerian terkait, masyarakat, dan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Bapak Presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian-kementerian

Mei, Gorontalo Alami Deflasi

dari halaman 1

Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo mengatakan, angka deflasi yang mencapai 0,96 persen merupakan deflasi terdalam secara nasional, sementara inflasi tahun kalender (year to date) masih terkendali di angka 1,13 persen.

“Komoditas yang menyumbang andil deflasi dibulan mei 2026 ini adalah tomat sebesar 0,09 persen, beras 0,05 persen, nasi dengan lauk 0,04 persen, ikan malalugis/ikan sorih dan angkutan udara masing-masing sebesar 0,03 persen, sigaret

kretek mesin (SKM), bakso siap santap, bahan bakar rumah tangga, roti manis serta cat tembok masing-masing menyumbang andil inflasi sebesar 0,02 persen,” papar Agus Sudibyo dalam keterangan persnya. Selasa, (2/5)

Menurut Agus Sudibyo, meskipun mengalami inflasi tahunan yang mengakibatkan naiknya harga beberapa komoditas namun masih ada beberapa komoditas lainnya yang menahan laju inflasi atau memberikan andil deflasi diantaranya cabai rawit -0,43 persen, daging ayam ras -0,14, telur ayam ras -0,14, ikan selar/ikan

tude -0,13, ikan mujair -0,12, cumi-cumi, ikan layang/ikan benggol emas perhiasan, ikan asap masing-masing menyumbang andil deflasi sebesar -0,05 persen sementara air kemasan -0,04 persen.

Dari sisi Indeks Harga Konsumen (IHK) dari dua wilayah di Provinsi Gorontalo pada Mei 2026, Kabupaten Gorontalo menjadi daerah dengan tingkat inflasi tertinggi yakni 3,67 persen atau berada di atas rata-rata provinsi yakni 2,99 persen. Untuk Kota Gorontalo sendiri mengalami inflasi lebih rendah diangka 2,19 persen. **(lyd)**

Kuasa Tambang

dari halaman 1

Termasuk apa saja tugas pemerintah pusat dan perusahaan pertambangan.

Intinya, semua perusahaan tambang selama ini sudah tunduk pada UU tersebut; berarti sudah melaksanakan UUD 1945 pasal 33.

Pasal 33 UUD itu sendiri pernah diamandemen. Yakni ketika dilakukan amandemen keempat tahun 2002.

Dalam perubahan itu tidak ada perubahan bunyi tiga ayat yang asli. Hanya saja ditambah dua ayat. Dengan demikian kalau di UUD yang asli pasal 33 itu hanya terdiri dari tiga ayat, setelah amandemen menjadi lima ayat.

Tambahan ayat keempat dan kelima itu rupanya untuk “mengakomodasikan” sektor swasta tanpa mengubah tiga ayat yang asli. Tiga ayat yang asli: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Lalu perhatikan tambahan dua ayat berikut ini. Jelas arahnya untuk melegalisasi usaha swasta yang sudah terlanjur mendarah-daging di Indonesia.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Saya memperhatikan masuknya dua kata: “efisiensi” dan “kemajuan”. Efisiensi dipahami hanya bisa

maksimal kalau ekonomi dijalankan dengan pasar bebas. Koperasi dan perusahaan negara selalu diragukan bisa seefisien swasta. Pun dalam hal “kemajuan”. Prinsipnya, kemajuan hanya bisa cepat kalau ada insentif personal: laba untuk pemegang saham.

Koperasi dan BUMN bicara soal “kita”. Swasta bicara soal “saya”. Berapa “laba kita” kalah menarik dari “berapa laba saya”. Rumusan lebih lanjutnya: “dapat apa kita” kalah merangsang dari pada “dapat apa saya”.

Di pasal yang asli tidak disebutkan bagaimana cara melaksanakan pasal 33 itu. Untuk apa harus diatur lebih lanjut. Kan sudah sangat jelas. Rupanya peranan swasta belum jelas di situ. Maka diperlukan UU untuk melaksanakannya. UU memang bisa dipakai untuk “menyiasati” aturan di atasnya. Pun UU sering juga masih memerlukan aturan pelaksanaan. Dan aturan itu bisa dipakai untuk “menyiasati” UU-nya.

Bagi pengusaha tersebut sepanjang sudah sesuai dengan UU Minerba sebenarnya sudah sama dengan menjalankan UUD 1945 pasal 33.

UU Minerba (Mineral dan Batubara) sendiri aslinya lahir tahun 1967 --bernama UU Pokok Pertambangan. Lalu diubah tahun 2009 menjadi UU Minerba. Masih diubah lagi. Anda ikut menentangnya mati-matian itu: tahun 2020 --lewat Omnibus Law. Masih belum cukup: tahun lalu diubah lagi.

Perubahan terakhir itu Anda sudah tahu latar belakangnya: agar organisasi NU yang sudah mati-matian mendukung pemerintah waktu itu bisa mendapat izin tambang.

Di perubahan terakhir itulah ada ayat yang menyebut izin wilayah pertambangan diprioritaskan untuk koperasi, UMKM, dan badan usaha yang didirikan oleh ormas.

Di tahun 1967, ketika pertama kita punya UU Pertambangan kelihatannya dilahirkan untuk mengakomodasikan swasta. UU

Pokok Pertambangan ini lahir setelah lahirnya UU Penanaman Modal Asing. Sama tahunnya, 1967, tapi beda bulannya.

UU PMA di awal tahun, UU Pokok Pertambangan di akhir tahun.

Yang menarik, UU Pokok Pertambangan itu dasarnya tetap UUD 1945. Tapi di situ telah ditemukan cara agar swasta bisa melakukan penambangan tanpa dianggap melanggar Pasal 33.

Di UU Pokok Pertambangan itu muncul istilah “kuasa pertambangan”. Dengan demikian perusahaan swasta yang melakukan penambangan berstatus hukum “kuasa negara” untuk melakukan penambangan.

Tambangnya sendiri tetap milik negara. Perusahaan tambang adalah “kuasa pertambangan”. Perusahaan tambang mendapat kuasa dari negara untuk mengambil hasil kekayaan alam milik negara. Itu seperti halnya Anda yang memiliki deposito, lalu memberikan kuasa kepada saya untuk mengambil deposito Anda itu. Terserah Anda apakah Anda juga menyerahkan uang deposito ke saya seluruhnya atau sebagiannya.

Maka surat izin pertambangan adalah surat izin “kuasa pertambangan”. Semua surat kuasa bisa dicabut. Atau bisa diubah isinya: termasuk mewajibkan penerima surat kuasa untuk membayar pajak, bagi hasil dan menempatkan dolar hasil ekspornya (bukan hanya labanya) ke bank milik negara.

Di tahun 1967, ketika status Jenderal Soeharto masih “penjabat presiden”, sudah berani melahirkan UU Penanaman Modal Asing dan UU Pokok Pertambangan. Pak Harto baru resmi jadi presiden 12 Maret 1968.

Tahukah Anda siapa tokoh yang begitu kreatifnya bisa menemukan istilah “kuasa pertambangan” sehingga perusahaan pertambangan swasta bukanlah anak haram UUD 1945? Saya sendiri tidak tahu siapa dia/ia. (*)

terkait maupun dari masyarakat, termasuk dari para penerima manfaat dari program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo.

Dia menjelaskan BGN memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Oleh karena itu, lembaga tersebut memerlukan tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai prinsip akuntabilitas.

Prasetyo menyampaikan pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Dadan Hindayana, Lodewijk Pusung, dan Sony

Israel Bakal Larang Adzan...

dari halaman 1

Mengutip laporan Anadolu Agency pada Senin eskalasi ini memicu kecaman keras dari tokoh agama terkemuka di Yerusalem yang melihat adanya upaya sistematis untuk membungkam panggilan ibadah umat Islam tersebut secara hukum formal. Khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ekrima Sabri menegaskan bahwa manuver politik ini bukanlah hal baru, melainkan kelanjutan dari agenda yang berulang kali gagal dieksekusi di masa lalu.

“Masalah panggilan azan ini diangkat kembali setelah upaya berulang kali yang gagal untuk melarangnya atau mengecilkan volumenya,” kata Sabri dalam pernyataan resminya, dikutip Selasa (2/6/2026).

Sabri menjelaskan lebih lanjut bahwa Komite Menteri untuk Legislasi di parlemen Israel (Knesset) baru-baru ini telah resmi mengajukan draf RUU yang ditargetkan untuk membatasi ruang gerak azan umat Muslim, khususnya di wilayah Yerusalem Timur serta di kota-kota Arab yang berada di dalam wilayah Israel.

Tepat pada hari Minggu, komite tersebut menyetujui draf RUU mengenai pembatasan azan yang diusulkan oleh partai sayap kanan ekstrem Otzma Yehudit (Kekuatan Yahudi), yang dipimpin langsung oleh Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir.

Di dalam draf regulasi tersebut, Israel menetapkan aturan ketat bahwa tidak ada satu pun sistem pengeras suara atau sound system yang boleh dipasang atau dioperasikan di masjid mana pun tanpa adanya izin resmi, di mana penerbitan izin tersebut akan dinilai sepihak berdasarkan

Sonjaya atas kerja keras mereka dalam membangun fondasi dan mengembangkan BGN. Pemerintah mengharapkan pimpinan baru BGN dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia,” ucap Prasetyo. **(antara/jpnn)**

tingkat intensitas “kebisingan” serta jarak dekatnya masjid dengan area pemukiman warga Yahudi.

Berdasarkan usulan tersebut, aparat kepolisian Israel nantinya akan diberikan wewenang penuh untuk menuntut penghentian seketika terhadap kumandang azan jika dianggap terjadi pelanggaran di lapangan. Pihak partai sayap kanan menegaskan jika pelanggaran tersebut terus berlanjut secara berulang, aparat memiliki hak untuk menyita paksa pengeras suara masjid serta menjatuhkan sanksi denda finansial yang sangat berat. Meskipun demikian, RUU ini masih membutuhkan persetujuan final dari sidang pleno Knesset pada tanggal yang belum ditentukan.

Sabri kemudian melontarkan peringatan keras bahwa tindakan sepihak dari rezim zionis kali ini telah bergeser ke arah yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya.

“Upaya saat ini untuk melarang panggilan azan umat Muslim telah mengambil kelokan yang berbahaya dengan melegalkan pelarangan azan melalui penerbitan undang-undang untuk mengharamkannya,” tutur Sabri.

Sabri menambahkan bahwa Israel sama sekali tidak memiliki dasar yuridis maupun moral untuk mengubah tatanan hukum tradisional dan sejarah yang berlaku di tanah Palestina.

“Kekuatan pendudukan tidak memiliki hak untuk mengubah status quo yang ada di wilayah pendudukan. Mereka tidak memiliki hak untuk menetapkan undang-undang yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini sebelum masa pendudukannya,” ucap Sabri. **(net)**

Bukti Produk Pertanian...

dari halaman 1

Ia juga mendorong agar berbagai inovasi dan produk yang dihasilkan petani dapat ditampilkan secara menarik saat kunjungan peserta PENAS berlangsung.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke sentra budidaya kacang tanah di Tilihuwa. Menurut Idah, kemitraan petani dengan PT Garuda Food menjadi bukti bahwa produk pertanian lokal memiliki daya saing dan peluang pasar yang menjanjikan. Namun demikian, ia mengingatkan agar produk yang dipamerkan tidak hanya berupa hasil olahan modern, tetapi juga menampilkan kacang tanah lokal dalam bentuk aslinya sebagai bagian dari kekayaan pangan daerah.

“Kerja sama yang telah terjalin dengan industri tentu sangat baik. Namun saya berharap produk lokal tetap mendapat ruang untuk ditampilkan, sehingga pengunjung dapat melihat langsung kekayaan komoditas yang dimiliki Gorontalo sekaligus merasakan pengalaman yang lebih dekat dengan budaya dan tradisi masyarakat,” ujar Idah.

Dilokasi terakhir, Wagub meninjau budidaya ikan nila sistem bioflok yang dikelola generasi muda. Idah menilai usaha tersebut menjadi contoh nyata pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam

pengembangan sektor perikanan, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

“Ini menjadi motivasi bagi generasi muda untuk mengembangkan usaha sesuai bidang keilmuan yang dimiliki. Selain menghasilkan nilai ekonomi, kawasan ini juga berpotensi menjadi sarana edukasi dan destinasi yang menarik bagi masyarakat untuk mengenal budidaya perikanan modern,” kata Idah.

Wagub juga memberikan sejumlah masukan guna meningkatkan kenyamanan dan kualitas lokasi kunjungan peserta PENAS. Di antaranya dengan menambah sarana pendukung, menampilkan pameran produk dan inovasi petani maupun nelayan, serta memperkuat aspek edukasi pada setiap lokasi yang dikunjungi. Menurutnya, kesiapan lokasi tidak hanya diukur dari aspek fisik, tetapi juga dari kemampuan menampilkan potensi unggulan daerah secara menarik dan informatif.

“Dengan persiapan yang matang, tentu kita di Gorontalo diharapkan dapat memberikan kesan positif sekaligus memperkenalkan keberhasilan sektor pertanian dan perikanan daerah kepada peserta PENAS Tani dan Nelayan XVII pada 20-25 Juni mendatang,” tandasnya. **(tro/*)**

Pertamina Turunkan Harga BBM Nonsubsidi



Aktivitas distribusi BBM yang dilakukan Pertamina Patra Niaga Sulawesi.

(FOTO: DOK/PERTAMINA)

Truk Kontainer Dikeluhkan Melintas di Tanggidaa



Gubernur Gusnar Ismail saat berdialog dengan masyarakat Tanggidaa pada peresmian dimulainya pekerjaan peningkatan Jalan Hos Cokroaminoto, Senin (1/6/2026).

(FOTO: BAHRIAN/DISKOMINFOTIK)

GORONTALO – GP- Lalu lintas dan distribusi logistik menggunakan truk jumbo kontainer yang melintasi di Jln Hos Cokroaminoto (Tanggidaa) Kota Gorontalo, mendapat keluhan warga setempat. Hal ini disampaikan langsung dihadapan Gubernur Gusnar Ismail pada peresmian dimulainya pekerjaan peningkatan Jalan Hos Cokroaminoto, Senin (1/6). Keluhan tersebut disampaikan karena aktivitas kontainer dinilai

mengganggu kenyamanan dan membahayakan pengguna jalan.

Perwakilan warga yang tergabung dalam Aliansi Tanggidaa Menggugat Atika Tilolango, mengatakan masyarakat tidak menolok kendaraan kontainer melintas di kawasan tersebut. Namun, mereka meminta adanya pengaturan jam operasional agar tidak bertepatan dengan waktu aktivitas padat masyarakat.

“Kalau memang mau lewat sini,

silahkan. Tapi ada jamnya. Ini sudah setiap waktu,” kata Atika, dikutip dari laman resmi Pemprov Gorontalo.

Menurut Atika, keberadaan kontainer yang melintas di kawasan permukiman padat penduduk telah lama menjadi perhatian warga. Ia juga menyinggung adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan kontainer sehingga perlu ada langkah antisipasi dari pemerintah.

Menanggapi hal itu, Gusnar menyatakan usulan pengaturan jam operasional kontainer merupakan masukan yang baik. Pemerintah akan mengkaji tingkat kepadatan lalu lintas sebelum menetapkan waktu operasional yang tepat.

“Terima kasih atas sarannya, saya terima itu. Nanti Insya Allah kita bahas dulu supaya masyarakat kenyamanan dan keselamatannya terjamin, dunia usaha juga tidak terhambat. Kira-kira begitu boleh ya?,” kata Gusnar.

Ia menegaskan pemerintah akan mencari solusi yang dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat tanpa menghambat aktivitas distribusi barang. Hasil kajian tersebut nantinya menjadi dasar penetapan kebijakan operasional kendaraan kontainer di kawasan Jalan Hos Cokroaminoto. **(Tro)**

Berlaku Mulai 1 Juni, Dex Series Turun Harga, Sesuaikan Harga Pertamina Turbo

MAKASSAR – GP- Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis diesel Pertamina Dex dan Dexlite, serta penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis bensin Pertamina Turbo yang berlaku efektif mulai 1 Juni 2026. Langkah ini dilakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memastikan keberlanjutan penyediaan energi nasional.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian harga dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global dan formula harga sesuai ketentuan pemerintah. “Penurunan harga Pertamina Dex, Dexlite, serta penyesuaian harga Pertamina Turbo dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global serta parameter yang ditetapkan pemerintah melalui formula harga yang berlaku,” ujar Roberth. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga

dalam menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Roberth menambahkan bahwa penyesuaian harga tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, daya beli, serta keberlangsungan penyediaan produk BBM nonsubsidi yang kompetitif di pasar.

“Untuk sektor diesel, dengan harga yang lebih kompetitif, kami berharap dapat memberikan manfaat yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi nasional,” lanjutnya. Pertamina Patra Niaga akan terus memantau perkembangan pasar energi global dan berkoordinasi dengan pemerintah guna memastikan layanan energi yang andal, kompetitif, dan berkelanjutan bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan pasokan BBM di seluruh jaringan SPBU Pertamina di Indonesia tetap terjaga guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat maupun sektor usaha. “Pertamina Patra Niaga akan terus memastikan ketersediaan energi tetap tersedia, andal, dan mudah diakses masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk produk BBM berkualitas untuk mendukung performa kendaraan,” pungkas Roberth. **(Tro)**

DAFTAR HARGA BBM RETAIL NONSUBSIDI

- * Dexlite (CN 51): dari Rp26.600/liter menjadi Rp23.500/liter.
- * Pertamina Dex (CN 53): dari Rp28.500/liter menjadi Rp25.350/liter.
- * Pertamina (RON 92): Rp12.600/liter (tetap).
- * Peralite (RON 90): Rp10.000/liter (tetap).
- * Pertamina Turbo (RON 98): dari Rp20.3500/liter menjadi Rp21.200/liter.

PENGUMUMAN LELANG ULANG BARANG RAMPASAN

Menunjuk Pengumuman Lelang tanggal 31 Maret 2026 di Surat Kabar Harian Gorontalo Post, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI akan melakukan Lelang Ulang Barang Rampasan Negara yang diperhitungkan sebagai uang pengganti dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo, dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg tanggal 06 Maret 2024 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT.BTN tanggal 07 Mei 2024 atas nama Terpidana Rusjdi Basalamah, dengan objek lelang sebagai berikut:

No.	Jenis Barang Rampasan	Lokasi	Luas (m2)	Dokumen Kepemilikan	Nilai Wajar (Rp)	Jaminan Penawaran Lelang (Rp)
1.	1 (satu) Bidang tanah dan bangunan	Jalan Manggis, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	6.473	SHGB Nomor 515 atas nama pemegang hak PT Wisata Surya Timur	74.321.341.000,00	22.297.000.000,00

Hari / Tanggal : Rabu / 10 Juni 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 10 Juni 2026 pukul 10:00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo, Jalan Achmad Nadjmudin No.7 Kota Gorontalo
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat-Syarat Lelang :

- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik e-Auction open bidding yang diakses pada alamat domain lelang.go.id.
- Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan penawaran lelang yang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang. Nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening VA harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Gorontalo selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Peserta Lelang adalah: Perseorangan yang memiliki: Tanda Pengenal (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Badan Hukum yang memiliki: Akta Pendirian dan perubahannya (jika ada), Tanda Pengenal (KTP) sesuai nama yang tertera dalam Akta Perusahaan dan Kuasanya (apabila dikuasakan).
- Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah dengan bea lelang sebesar 2% (dua persen) dari harga lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang dan jika tidak melunasi maka Pembeli akan dinyatakan Wanprestasi dan Uang Jaminan penawaran lelang langsung disetorkan ke Kas Negara.
- Objek yang akan dilelang sesuai dengan KONDISI APA ADANYA (as is) dengan segala cacat/resiko/kekurangan fisik dan non fisik, maupun konsekuensi biaya tertunggak yang sudah ada maupun yang akan ada atas objek lelang dibebankan kepada pemenang lelang.
- Asli dokumen kepemilikan berupa sertifikat objek lelang dikuasai penjual.
- Peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui/memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti serta apabila karena suatu hal terjadi penundaan atau pembatalan pelaksanaan lelang, maka pihak-pihak yang berkepentingan/peminat/peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Gorontalo maupun Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI.
- Uang jaminan penawaran lelang dari Peserta Lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap bank.
- Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Pemulihan Aset, Jl. Kebagusan Raya No. 36 Pasar Minggu, Jakarta Selatan Telp/WA: 0811-8119-1111 dan informasi terkait teknis lelang dapat ditanyakan kepada KPKNL Gorontalo, Jalan Achmad Nadjmudin No.7 Kota Gorontalo.

Jakarta, 03 Juni 2026
Pit. KEPALA PUSAT PENYELESAIAN ASET,
Ttd
SOFYAN SELLE, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA MADYA

Tekun Jualan Kuliner, Perantau Asal Brebes Sukses di Limboto

LIMBOTO- Seorang penjual jajanan batagor di Kelurahan Kayubulan, Jalan Hasan Dangkuwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, membuktikan bahwa usaha kuliner dapat menjadi sumber penghidupan yang menjanjikan. Penjual tersebut diketahui merupakan perantau asal Brebes, Jawa Tengah, yang telah menjalankan usahanya di Gorontalo selama 10 tahun.

Darsono, selaku pemilik usaha batagor tersebut, membuka lapaknya setiap hari mulai pukul 16.00 Wita hingga dagangannya habis terjual. Batagor yang dijual dibanderol dengan harga mulai dari Rp5.000 hingga Rp15.000, tergantung jumlah pesanan pembeli.

Menurut Darsono, alasan dirinya memilih Gorontalo sebagai tempat berjualan karena kondisi kota yang dinilainya aman dan nyaman dari berbagai tindak kekerasan maupun gangguan lainnya.

Faktor tersebut membuatnya merasa betah untuk menetap dan mengembangkan usaha di daerah tersebut. Selama menjalankan usaha batagor, Darsono mengaku hasil



(FOTO: DOK/IMG/GORONTALOPOST)

BATAGOR salah satu jajanan kuliner di Limboto yang dijalankan perantau asal Brebes, Darsono.

penjualannya sangat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ia juga bersyukur karena usaha yang dirintisnya sejak satu dekade lalu masih mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Ke depan, Darsono berharap

dagangannya semakin laris dan usahanya dapat terus berkembang. Ia juga memiliki keinginan untuk memperluas usahanya hingga mampu merekrut karyawan sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. **(Mg-03)**

Polda Sikat Penyalahgunaan BBM Subsidi

Pertamina Apresiasi, Sebut Merugikan Negara

MAKASSAR – GP - Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengapresiasi langkah dan upaya yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi melalui penangkapan kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999. Tindakan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga tata kelola distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.

Executive General Manager
Pertamina Patra Niaga Regional
Sulawesi, Deny Sukendar,
menyampaikan bahwa Pertamina
mendukung penuh upaya aparat
penegak hukum dalam memberantas
segala bentuk penyalahgunaan BBM
subsidi yang berpotensi merugikan
negara dan masyarakat.

“Pertamina mengapresiasi langkah tegas Polda Sulawesi Selatan dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Kami siap terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Deny.

Sebagai bagian dari upaya

pengawasan dan pengendalian distribusi BBM subsidi, Pertamina telah mengimplementasikan Program Subsidi Tepat lebih dahulu melalui sistem digitalisasi transaksi di seluruh SPBU. Sistem ini memungkinkan proses pencatatan dan monitoring penyaluran BBM subsidi dilakukan secara lebih akurat, transparan, dan terukur. Selain itu, Pertamina juga mendukung percepatan implementasi sistem XSTAR BPH Migas untuk penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bagi konsumen non kendaraan. Melalui sistem tersebut, proses penerbitan surat rekomendasi diharapkan menjadi lebih transparan, akurat, dan meminimalkan potensi penyalahgunaan.

“Pemanfaatan sistem digital baik melalui Program Subsidi Tepat maupun XSTAR menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi sehingga penyalurannya benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Kami juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan agar pengawasan distribusi energi subsidi dapat berjalan lebih efektif,” tambah Deny.

Di sisi pengawasan internal, Pertamina secara aktif melakukan

pembinaan dan evaluasi kepada lembaga penyalur BBM, termasuk SPBU di wilayah Sulawesi Selatan. Sepanjang periode 2025 hingga 2026, Pertamina telah menerbitkan sebanyak 112 surat pembinaan dan peringatan kepada lembaga penyalur yang terindikasi tidak menjalankan ketentuan operasional secara optimal. Sanksi yang diberikan bervariasi mulai dari surat peringatan hingga penghentian sementara penyaluran BBM. Sebagai langkah pengendalian tambahan, berdasarkan informasi dan hasil koordinasi dengan SPBU, Pemerintah Daerah, serta Aparat Penegak Hukum, Pertamina juga telah melakukan pemblokiran terhadap nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan penyalahgunaan atau transaksi BBM subsidi yang tidak sesuai ketentuan di wilayah Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, Pertamina bersama Ditreskrimsus Polda Sulsel, Dinas ESDM, Dinas Perdagangan, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan juga telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha dan industri, termasuk di kawasan Industri Makassar (KIMA), terkait mekanisme pembelian BBM untuk kebutuhan operasional industri sesuai regulasi yang berlaku. **(Tro)**



Barang bukti BBM subsidi yang disalahgunakan disita Polda Sulsel.

Masjid Al-Bambu Alam Bulota, Masjid Unik di Kaki Gunung
Jadi Tempat Kegiatan Keagamaan, Akses yang Jadi Tantangan

Sebuah masjid unik berdiri di kawasan kaki gunung di Lingkungan V Polahua, Kelurahan Bulota, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Masjid yang dikenal dengan nama Masjid Al-Bambu Alam Bulota ini menjadi salah satu tempat ibadah yang menarik perhatian karena lokasinya yang berada di kawasan perbukitan dengan akses yang cukup menantang.

UNTUK mencapai masjid tersebut, pengunjung harus menyeberangi dua jembatan yang terbuat dari bambu. Kondisi ini menjadikan perjalanan menuju masjid memiliki pengalaman tersendiri bagi masyarakat maupun para pendatang yang berkunjung.

Masjid Al-Bambu Alam Bulota telah lama dibangun. Pada awalnya bangunan masjid sepenuhnya terbuat dari bambu. Namun pada tahun 2016, bangunan tersebut direnovasi dan beralih menggunakan konstruksi batu sehingga lebih kokoh dan nyaman digunakan untuk beribadah.

Masyarakat setempat mengaku terkadang mengalami kesulitan saat menuju masjid, terutama bagi warga yang telah lanjut usia. Meski demikian, bagi kalangan anak muda, akses menuju masjid justru dianggap sebagai tantangan sekaligus daya tarik tersendiri.

Salah satu warga setempat, Juriyati Rajak, mengatakan bahwa masjid tersebut masih aktif digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan



Masjid Al Bambu di Kelurahan Bulota, Kab Gorontalo yang menjadi salah satu lokasi pusat kegiatan keagamaan masyarakat.

berbagai kegiatan keagamaan.

“Masjid ini sering digunakan. Saat ini pengelolaannya dilakukan oleh Ta’mirul Masjid yang diketuai oleh Yusuf Husnan dan sekretaris Mahmud Arifin,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kepengurusan ta'mirul masjid yang baru resmi dibentuk pada tahun lalu. Sebelumnya, jabatan ketua dipegang oleh Mohammad Rahman. Namun karena faktor usia, ia memutuskan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada pengurus yang baru.

Selain keunikannya, suasana di sekitar Masjid Al-Bambu Alam

Bulota juga dikenal sangat sejuk dan asri. Udara dingin yang berasal dari kawasan pegunungan membuat jamaah merasa nyaman saat beribadah. Ketersediaan air bersih yang berasal langsung dari mata air di sekitar lokasi semakin menambah daya tarik masjid tersebut.

Keberadaan Masjid Al-Bambu Alam Bulota tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat setempat, tetapi juga menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk dikunjungi karena keindahan alam dan suasananya yang menenangkan.

(Mg-03)



KASUS CHROMEBOOK

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim mengatakan, pengadaan Chromebook justru menghemat keuangan negara senilai Rp 3,9 triliun. Sebab, kata dia, kebijakan Kemendikbudristek untuk memilih sistem operasi Chrome yang gratis secara mutlak telah menghemat pengeluaran anggaran.

“Angka penghematan ini justru jauh di atas dugaan kerugian negara dalam kasus Chromebook,” kata Nadiem dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa.

Ia menjelaskan saat tim pengadaan mempresentasikan rekomendasi mereka kepada dirinya, diestimasi biaya paket sekolah jika semua laptopnya memiliki sistem operasi Windows seharga total Rp148 juta per sekolah, sedangkan kombinasi sistem operasi Chrome dan Windows biayanya sebesar Rp98 juta per sekolah.

Apabila dinyatakan bersalah, Nadiem mempertanyakan, apakah artinya negara berpendapat bahwa seharusnya Kemendikbudristek memilih opsi yang lebih mahal.

Untuk itu, dia menilai terdapat ironi dalam kasus dugaan Chromebook, yakni tuntutan secara total pidana utama dan subsidier selama 27 tahun dan 6 bulan penjara terhadap dirinya untuk suatu kebijakan yang telah menghemat triliunan anggaran negara.

Yang lebih mengejutkan lagi, kata dia, terdapat fakta bahwa keputusan memilih sistem operasi Chrome bukan merupakan keputusan menteri.

Hal itu karena, kata Nadiem, tidak pernah menandatangani dokumen apa pun yang berhubungan dengan pengadaan laptop Chromebook di bawah Kemendikbudristek. “Walaupun saya setuju dengan keputusan tim teknis yang telah menghemat anggaran begitu besar, kewenangan ini mutlak ada di level mereka,” ucap dia.

Menurutnya, ia dikaitkan dengan kebijakan tersebut hanya karena tim mengundangnya untuk menghadiri satu rapat melalui Zoom pada 6 Mei 2020. Saat itu terdapat rekomendasi kombinasi sistem operasi Windows dan Chrome, yang akhirnya diubah kembali pada level tim teknis menjadi 100 persen sistem operasi Chrome.

Perubahan itu, sambung dia, dilakukan tanpa sepengetahuan Nadiem sehingga secara hukum administrasi negara, langkah tersebut bukan keputusan menteri.

Selain itu, dirinya berpendapat dalam kasus tersebut, kausalitas antara kebijakan dan kerugian negara pun tidak ada.

“Kalau pun ada kerugian negara

LOWONGAN PEKERJAAN



PT. DUA JAWA BERSAUDARA (GROUP)

Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi energi, khususnya Agen Bright Gas, LPG, subsidi 3 kg, dan SPRL, membuka kesempatan bagi Anda yang berkompeten untuk bergabung bersama tim kami.

DRIVER

BINGKASAN PEKERJAAN :
 Driver bertugas melaksanakan proses distribusi tabung LPG dan Bright Gas dari gudang ke pelanggan sesuai rute yang ditentukan. Pekerjaan mencakup mengemudi kendaraan operasional, membantu proses muat dan bongkar, memastikan keamanan serta pelayanan kendaraan dan muatan, serta mematuhi prosedur keselamatan kerja. Posisi ini membutuhkan fisik yang kuat, disiplin, dan kemampuan bekerja sama untuk memastikan pengiriman berjalan tepat waktu, aman, dan sesuai standar perusahaan.

KUALIFIKASI :

- Pria berusia maksimal 45 tahun
- Memiliki SIM B 1 Umum atau B 1 Umum Aktif
- Sehat Jasmani & Rohani
- Pendidikan Minimal SMA/SMK
- Pribadi yang jujur, rajin dan bertanggungjawab
- Mampu bekerjasama dalam tim

TUGAS & TANGGUNGJAWAB :

- Melakukan proses distribusi sesuai dengan jadwal dan rute yang telah ditentukan
- Mengemudi mobil sesuai dengan standart perusahaan
- Menghunting dan menurunkan tabung LPG sesuai dengan jumlah yang tertulis di atas kendaraan dan sesuai dengan permintaan pelanggan
- Melakukan proses dokumentasi saat penyaluran ke pangkalan
- Melakukan efisiensi penggunaan BBM
- Menjaga dan memelihara mobil yang dibawa serta melakukan pemeliharaan rutin
- Menjaga waktu idle kendaraan sesuai dengan standart perusahaan

Kirimkan CV dan lamaran ke :
 Email: dibrekutmen@yahoo.com
 Subjek Driver - (Nama Anda)

Atau kirim langsung ke :
 Kantor LPG-Bright Gas P1 Sinar Berkah Abadi
 Pentadito Timur Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo

Informasi Selengkapnya 0823-9549-0147

Gaji 13 Mulai Cair



PANEN. Suasana panen ke enam yang mencapai 1.8 ton kacang tanah

Panen Keenam, Tilihuwa Mantapkan Sebagai Agrowisata Kacang Tanah

LIMBOTO-GP-Komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mengembangkan Kelurahan Tilihuwa sebagai sentra dan agrowisata kacang tanah terus menunjukkan hasil yang menggembirakan. Program yang dicanangkan oleh Bupati Gorontalo, Sofyan Puihi, sejak tahun 2025 kini telah memasuki panen keenam dengan hasil yang semakin menjanjikan.

Pada panen kali ini, lahan seluas 1,3 hektare berhasil menghasilkan sekitar 1,8 ton kacang tanah. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa program pengembangan kawasan agrowisata kacang tanah di Tilihuwa tidak hanya mampu menjaga produktivitas pertanian, tetapi juga membuka

peluang peningkatan ekonomi masyarakat.

Bupati Sofyan Puihi menyampaikan bahwa Tilihuwa sejak lama dikenal sebagai daerah penghasil kacang tanah. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berupaya mengembalikan identitas tersebut melalui penguatan branding kawasan, peningkatan produktivitas petani, serta perluasan akses pasar.

"Tilihuwa memiliki sejarah dan potensi besar sebagai sentra kacang tanah. Branding itu sudah ada, dan sekarang tugas kita adalah memperkuat produksi sekaligus memastikan pasar bagi hasil pertanian masyarakat," ujar Bupati Sofyan disela sela panen,

Selasa (2/6).

Menurutnya, keberhasilan enam kali panen berturut-turut menjadi indikator bahwa program yang dijalankan berada pada jalur yang tepat. Pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan melalui pendampingan petani, penguatan kelembagaan kelompok tani, hingga pengembangan kawasan agrowisata berbasis komoditas unggulan.

Lebih jauh, upaya pengembangan kacang tanah Tilihuwa kini diperkuat dengan terbukanya akses pasar melalui kolaborasi strategis bersama Rachmat Gobel dan perusahaan makanan nasional Garudafood. Kerja sama tersebut diharapkan

mampu menjamin keberlanjutan pemasaran hasil panen sekaligus memberikan kepastian usaha bagi para petani.

Selain mendukung program ketahanan pangan, pengembangan agrowisata kacang tanah Tilihuwa juga diarahkan menjadi salah satu ikon ekonomi lokal Kabupaten Gorontalo.

Dengan sinergi antara pemerintah, petani, dunia usaha, dan pemerintah pusat, Tilihuwa diharapkan semakin dikenal sebagai kawasan unggulan pertanian yang produktif, bernilai ekonomi tinggi, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (WIE)

Pemkabgor Gelontorkan Rp25,45 Miliar

LIMBOTO-GP-Hari ini, Selasa (2/6/2026) Pemerintah Kabupaten Gorontalo mulai menyalurkan Gaji Ke-13 Tahun 2026 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota DPRD. Pembayaran tersebut dilaksanakan sesuai instruksi Bupati Gorontalo, Sofyan Puihi, dan Wakil Bupati Tonny Junus, serta dilakukan bersamaan dengan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Reguler bulan Juni 2026.



Sofyan Puihi

Bupati Gorontalo Sofyan Puihi menegaskan, pembayaran Gaji Ke-13 dan TPP secara bersamaan diharapkan dapat membantu ASN dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga, sekaligus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kesejahteraan aparatur merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah," ungkap Bupati Sofyan.

Sementara itu, Kepala BKAD Kabupaten Gorontalo memastikan seluruh proses pembayaran telah dipersiapkan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima oleh para penerima mulai hari ini. Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap pencairan Gaji Ke-13 dan TPP Reguler Juni 2026 dapat memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat serta memperkuat perputaran ekonomi di daerah. Langkah ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak aparatur secara tepat waktu di tengah berbagai tantangan pengelolaan fiskal daerah.

Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo, total penerima Gaji Ke-13 mencapai 5.260 orang yang terdiri dari 2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 4.032 Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), 1.186 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta 40 anggota DPRD Kabupaten Gorontalo. Total anggaran yang disalurkan mencapai Rp25.493.310.189 dengan nilai bersih yang diterima sebesar Rp25.453.809.580 setelah pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar Rp39.500.609. (WIE)

OTOMOTIF

AHASS ARM Motor Resmi Dibuka di Malalayang

DAW Perkuat Layanan Purna Jual Honda di Manado

MANADO - PT. Daya Adicipta Wisesa (DAW) selaku Main Dealer sepeda motor Honda wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara terus memperluas jaringan layanan purna jual guna memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen Honda. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peresmian AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) baru, AHASS ARM Motor, yang berlokasi di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Malalayang I, Kecamatan Malalayang, Kota

Manado.

Pembukaan AHASS ARM Motor dihadiri oleh perwakilan PT DAW, Ridwan Marpela selaku Technical Service Department Head. AHASS ARM Motor hadir dengan fasilitas pelayanan servis yang didukung oleh 3 pit kerja dan 3 mekanik tersertifikasi Honda yang siap memberikan pelayanan sesuai standar Honda.

Kehadiran AHASS baru ini diharapkan dapat semakin mendekatkan layanan servis berkualitas kepada konsumen Honda, khususnya di wilayah Malalayang dan sekitarnya.

Technical Service Department Head PT DAW, Ridwan Marpela, menyampaikan bahwa pembukaan AHASS ARM Motor

merupakan bagian dari upaya Honda untuk terus meningkatkan kepuasan pelanggan melalui jaringan layanan yang mudah dijangkau dan berkualitas.

"Kami menyambut baik hadirnya AHASS ARM Motor sebagai bagian dari jaringan layanan Honda. Dengan fasilitas yang memadai dan didukung mekanik yang kompeten, kami berharap AHASS ini dapat memberikan pengalaman servis terbaik bagi konsumen Honda. Kehadiran AHASS baru juga menjadi wujud komitmen kami dalam memberikan layanan purna jual yang cepat, mudah, dan terpercaya bagi masyarakat," ujar Ridwan.

Selain menghadirkan layanan servis berkala dan perawatan

sepeda motor Honda, AHASS ARM Motor juga menyediakan suku cadang asli Honda serta layanan yang mengedepankan standar kualitas dan kepuasan pelanggan.

Melalui penambahan jaringan AHASS ini, PT DAW berharap dapat terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi seluruh pengguna sepeda motor Honda di wilayah Sulawesi Utara.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan dan jaringan AHASS Honda, konsumen dapat mengunjungi AHASS terdekat atau mengakses kanal informasi resmi Honda. (Tro)



PT DAW memperluas jaringan layanan purna jual guna memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen Honda, dengan menghadirkan AHASS ARM Motor di Malalayang.



Herman Haluti

PAD Harus Digenjot

Pengelolaan Aset Diharapkan Lebih Maksimal

GORONTALO - GP - Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Gorontalo. Salah satu langkah yang dinilai strategis ialah memaksimalkan pengelolaan aset daerah agar

tidak sekadar menjadi aset pasif, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan dan penguatan fiskal daerah

“Masih banyak aset daerah yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Padahal, potensi PAD kita cukup besar jika pengelolaannya dilakukan dengan baik dan profesional,” ujar Ketua Komisi

II Dekot Gorontalo, Herman Haluti

Salah satu aset yang disorot ialah Pasar Duingi, yang kini tidak lagi berfungsi sebagai pasar aktif. Kondisi ini dinilai menjadi cerminan lemahnya manajemen aset daerah yang justru berpotensi membebani keuangan daerah.

“Aset seperti Pasar Duingi perlu segera ditangani secara

strategis. Jangan sampai dibiarkan mangkrak, karena bisa menimbulkan kerugian ekonomi dan menghambat potensi pendapatan daerah,” tambahnya.

Selain aset fisik, Herman juga menyoroti perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Ia menilai, kemandirian fiskal daerah

hanya bisa terwujud jika pemerintah mampu menata sistem pendapatan secara transparan dan berkelanjutan.

“Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar pengelolaan PAD lebih efektif. Optimalisasi aset dan pajak harus menjadi fokus utama untuk memperkuat ekonomi daerah,” tandasnya. (Adv)



(F. DIYANTI/GORONTALO POST)

Rapat paripurna yang digelar di Aula I Dekot.

Sahlan Dukung Upaya PMI Jaga Stok Darah

GORONTALO - GP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo, mendukung penuh terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan Palang Merah Indonesia (PMI), khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan stok darah bagi masyarakat.

Ketua Komisi I Dekot, Sahlan Tapulu menegaskan bahwa PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang perannya sangat dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, keberadaan PMI menjadi salah satu garda terdepan dalam membantu pelayanan kesehatan, terutama dalam penyediaan darah yang kerap dibutuhkan dalam situasi

darurat maupun pelayanan medis rutin.

“PMI adalah organisasi yang bergerak di bidang kesehatan dan sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan stok darah.

Inilah salah satu alasan kenapa kami di Komisi I DPRD Kota Gorontalo mendukung kegiatan tersebut,” ujar Sahlan.

Ia menjelaskan, kebutuhan darah di fasilitas kesehatan sering kali bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda. Oleh karena itu, kegiatan PMI seperti donor darah perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat umum.



Sahlan Tapulu

Sahlan juga menilai bahwa dukungan Dekot tidak hanya bersifat moral, tetapi juga perlu diwujudkan melalui kolaborasi dan sinergi lintas sektor.

Dengan kerja sama yang baik, kegiatan PMI diharapkan dapat berjalan berkelanjutan dan

menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemanusiaan seperti donor darah harus terus didorong. Ini bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga soal kepedulian sosial dan solidaritas kemanusiaan,” tambahnya.

Untuk itu, Sahlan berharap PMI terus meningkatkan perannya dalam pelayanan kesehatan, sekaligus memperluas edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya donor darah secara rutin.

Dengan dukungan semua pihak, ketersediaan stok darah di Kota Gorontalo diharapkan tetap aman dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat kapan pun diperlukan. (Adv)

Siskamling Didorong Jadi Benteng Keamanan Lingkungan

GORONTALO - GP - Kembalinya program sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang diaktifkan Pemerintah Kota Gorontalo mendapat respons positif dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo, Rollis Helingo. Program yang dijalankan melalui instruksi Wali Kota Gorontalo itu dinilai bukan sekadar kegiatan ronda malam, tetapi juga strategi sosial untuk memperkuat keamanan dan kepedulian warga.

Anggota Komisi I Dekot itu, menilai siskamling memiliki dampak besar terhadap aktivitas masyarakat di tingkat kelurahan maupun kecamatan.

Menurutnya, pengamanan swakarsa berbasis masyarakat tersebut dapat menjadi garda awal dalam mencegah gangguan keamanan sekaligus membangun solidaritas sosial di lingkungan tempat tinggal.

“Karena siskamling ini bentuk pengamanan swakarsa berbasis masyarakat seperti ronda atau patroli, untuk menciptakan ketertiban di tingkat RT/RW.

Kegiatan ini melibatkan warga secara bergilir untuk mencegah kejahatan, mendeteksi gangguan dan memperkuat kepedulian sosial yang merupakan bentuk bela negara dan gotong royong,” ujar Rollis.

Ia menjelaskan, meskipun terlihat sederhana, program siskamling memiliki manfaat yang luas karena masyarakat ikut mengambil peran menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan sekitar. Keberadaan siskamling



Rollis Helingo

tidak hanya membantu pemerintah daerah, tetapi juga mendukung tugas aparat keamanan dan para pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga ketertiban masyarakat.

“Bukan hanya pemerintah daerah yang merasa terbantu melalui program siskamling ini, tetapi anggota DPRD, aparat kepolisian pun ikut terbantuan, sebab melalui kegiatan seperti ini angka kriminal bisa ditekan,” jelasnya.

Rollis berharap program tersebut tidak berhenti sebagai kebijakan sesaat, melainkan dimasifkan di seluruh wilayah Kota Gorontalo.

Ia juga mendorong keterlibatan generasi muda dalam kegiatan siskamling sebagai langkah preventif mencegah aktivitas negatif di kalangan remaja.

“Kami berharap, program siskamling ini bisa dimasifkan di setiap wilayah di Kota Gorontalo, bila perlu bisa melibatkan anak-anak muda agar mereka bisa dijauhkan dari aktivitas yang menyimpang,” pungkasnya. (Adv)

PENGUMUMAN LIKUIDASI

Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan RUPS tertanggal 28 April 2026, para pemegang saham **PT. CAKRAWALA BANGUNAN GORONTALO**, yang berkedudukan di Kabupaten Gorontalo (“Perseroan”), diantaranya telah menyetujui dan memutuskan membubarkan Perseroan dengan menunjuk Direksi dan Dewan Komisaris sebagai Tim Likuidatur Perseroan.

Demikian pengumuman ini disampaikan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat menghubungi Tim Likuidatur Perseroan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini.

Tim Likuidatur
PT. CAKRAWALA BANGUNAN GORONTALO
(dalam likuidasi)

ANDA INGIN

Berlangganan Koran
Gorontalo Post

atau

**KORAN ANDA
BELUM DIANTAR
AHRI INI**

Hubungi :
0812-4470-554

GORONTALO POST
750 Honorer Kota Diberhentikan

METRO-POLES

SHOWBIZ

Home Poster Rumble Haras

Card Jember Gak
Punya Kiblat di Kota

J&T CARGO
GORONTALO 907A

**100%
Dijamin
Ekonomis**

0853 9448 8783 0822 9309 9280 0821 9588 2277

J&T Cargo Gorontalo Post

KIRIM CEPAT, MURAH & BISA BANYAK

Alamat : Jl. Dr. Jhon Aryo Katili No.144 Kel. Paguyaman
Kec.Kota Tengah, Kota Gorontalo

RENUNGAN
ROHANI
BE RADIO - 94.3 FM
SETIAP HARI
08.00 WITA

CITY HARVEST CHURCH INDONESIA - GORONTALO

JL. WOLTER MONGINSIDI
CONTACT PERSON 0435-829392
WHATSAPP : 085256276914
INSTAGRAM/FACEBOOK : C HARVEST GORONTALO
YOUTUBE : CHC INDO GTO

IBADAH RALLY PRAYER
SETIAP HARI KAMIS PUKUL 19.30 WITA

IBADAH DOA FAJAR VIA ZOOM MEETING
MEETING ID: 366 681 7318 - PASSCODE: BLESSED
SETIAP HARI JUMAT PUKUL 05.00 WITA

BEFORE BED (DOA SEBELUM BERISTIRAHAT)
VIA ZOOM MEETING ID: 366 681 7318 - PASSCODE: BLESSED
SETIAP HARI SENIN DAN JUMAT PUKUL 21.00 WITA

GEREJA ANAK (CHILDREN'S CHURCH)
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 09.30 WITA

IBADAH RAYA PAGI (LIVE STREAMING VIA YOUTUBE)
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 09.00 WITA

IBADAH RAYA SORE (DI HOTEL ELIZABETH LIMBOTO, SAMPING POLRES)
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 17.00 WITA

IBADAH STAY : STUDENT-TEENAGE-AND-YOUTH
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 17.00 WITA

RANPERDA PAJAK- RETRIBUSI DAERAH Tarif Kesehatan Tak Beratkan Warga

PUNCAK BOTU -GP- Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hasri Ainun Habibie, Selasa (2/6/2026).

Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Sun Biki, bersama jajaran anggota pansus lainnya. Rombongan diterima oleh Direktur RSUD Hasri Ainun Habibie, dr. Fitriyanto Rajak, M.K.M., beserta jajaran manajemen rumah sakit.

Sun Biki menegaskan bahwa pembahasan perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus tetap menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Menurutnya, rumah sakit bukanlah institusi yang semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Rumah sakit merupakan OPD pelayanan publik. Pendapatan yang diperoleh sebagian besar kembali digunakan untuk operasional pelayanan kesehatan. Karena itu, penyusunan tarif harus memiliki dasar hukum yang kuat sekaligus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat," ujar Sun Biki.

Ia juga menjelaskan bahwa kunjungan lapangan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan dan fasilitas rumah sakit sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan tarif pelayanan kesehatan yang akan diatur dalam perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sementara itu, Anggota Pansus Manaf Hamzah menekankan pentingnya melihat fakta di lapangan sebelum mengambil keputusan terkait tarif pelayanan rumah sakit. Ia mengapresiasi respons cepat RS Ainun Habibie dalam menangani korban kecelakaan yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Dokumen sudah ada di tangan semua anggota pansus. Yang ingin kami lihat adalah kondisi riil di lapangan agar ketika membahas tarif, kami memiliki gambaran yang utuh dan objektif," ungkap Manaf.

Anggota Pansus Erwinsyah Ismail dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh dijadikan instrumen utama untuk mengejar pendapatan daerah. Menurutnya, penyusunan tarif harus mengedepankan aspek kemanusiaan dan keterjangkauan layanan bagi masyarakat. "Rumah sakit bukanlah mesin pendapatan daerah, melainkan rumah pelayanan kemanusiaan yang harus memberikan akses kesehatan terbaik bagi masyarakat," tegas Erwinsyah. (rmb)



RAPAT Pansus Ranperda pajak dan retribusi daerah saat melakukan pertemuan dengan jajaran direksi RSUD Hasri Ainun Habibie.



PIMPINAN dan anggota Komisi II Deprov Gorontalo berkonsultasi di Komisi XII DPR-RI yang diterima oleh anggota Komisi XII dari Gorontalo, Rusli Habibie.

KOMISI II KONSULTASI KE KOMISI XII

Bahas KelangkaanBBM di Gorontalo

PUNCAK BOTU -GP- Pimpinan dan Anggota Komisi II Deprov Gorontalo mendampingi Komisi XII DPR RI berkonsultasi soal kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih terjadi di Provinsi Gorontalo.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa. Rombongan DPRD Provinsi Gorontalo diterima langsung oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Rusli Habibie, yang membidangi sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi.

Dalam kesempatan tersebut Ridwan Monoarfa, mengungkapkan bahwa persoalan kelangkaan BBM yang terjadi di Gorontalo telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap aktivitas masyarakat, khususnya para pelaku usaha, nelayan, petani, serta sektor transportasi yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.

"Melalui kunjungan kerja ini, kami berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat untuk membantu mengatasi persoalan kelangkaan BBM yang masih dirasakan masyarakat Gorontalo. Ketersediaan energi merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi demi menjaga stabilitas ekonomi dan aktivitas masyarakat," ungkap Ridwan Monoarfa.

Sementara itu, Ketua Komisi II Mikson Yapanto, menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dan aspirasi dari masyarakat terkait terbatasnya pasokan solar

bersubsidi di sejumlah daerah.

"Kami datang untuk menyampaikan langsung kondisi yang terjadi di lapangan. Saat ini kebutuhan solar bersubsidi di Gorontalo masih cukup tinggi, sementara pasokan yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu, kami berharap adanya penambahan kuota serta evaluasi distribusi BBM agar penyalurannya dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran," ujar Mikson Yapanto.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat terkait ketersediaan BBM, khususnya solar bersubsidi yang hingga saat ini masih mengalami keterbatasan pasokan di sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo.

Pihak DPRD menegaskan bahwa upaya koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan agar persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari kementerian dan lembaga terkait. "Komisi XII DPR RI pada hari ini juga akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, SKK Migas, dan BPH Migas. Pada kesempatan tersebut, Rusli Habibie menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat Gorontalo yang telah kami sampaikan dalam pertemuan ini. Kami berharap persoalan kelangkaan BBM, khususnya solar bersubsidi, dapat menjadi perhatian serius dan segera mendapatkan solusi melalui kebijakan yang tepat dari

pemerintah pusat. Fokus utama kami adalah memastikan kelancaran dan kestabilan suplai migas di wilayah Provinsi Gorontalo," ujar Mikson Yapanto.

Selain itu, DPRD Provinsi Gorontalo juga menyampaikan bahwa mereka telah menerima surat rekomendasi resmi dari sejumlah pemerintah kabupaten yang secara khusus menyoroti kebutuhan penambahan kuota solar bersubsidi.

"Rekomendasi dari pemerintah kabupaten terkait perlunya penambahan suplai solar bersubsidi telah kami terima. Saat ini pasokan solar subsidi di Gorontalo masih mengalami kekurangan sehingga diperlukan tambahan kuota agar dapat segera disalurkan ke SPBU-SPBU yang membutuhkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat," tambah Mikson.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Rusli Habibie, menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Gorontalo. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, DPR RI, serta para pemangku kepentingan di sektor migas guna memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Menurutnya, berbagai aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian dan akan diteruskan dalam forum-forum resmi bersama mitra kerja Komisi XII DPR RI, termasuk saat RDP dengan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, SKK Migas, dan BPH Migas. (rmb)

PENDIDIKAN

Sarana Sekolah Pengaruhi Prestasi Akademik

Perbaikan Fasilitas dan Lingkungan Belajar Didorong

GORONTALO-GP- Capaian Tes Kompetensi Akademik (TKA) siswa di Provinsi Gorontalo dinilai tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Selama ini, rendahnya hasil TKA kerap diarahkan pada persoalan kompetensi guru, padahal terdapat faktor lain yang turut menentukan kualitas belajar siswa.

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi

Gorontalo, Rudi Syaifullah, menegaskan bahwa persoalan capaian akademik harus dilihat secara menyeluruh. Menurutnya, memperkuat kompetensi guru memang penting, namun tidak cukup jika tidak diimbangi dengan fasilitas belajar yang memadai.

"Kita melihat capaian anak didik. Kompetensi guru memang harus terus diperkuat, tetapi ada banyak faktor lain yang perlu diperhatikan, salah satunya sarana dan prasarana sekolah," ujar Rudi, Senin (12/1/2026).

Ia menyebut, kondisi ruang belajar, kelengkapan fasilitas,

hingga kenyamanan lingkungan sekolah berpengaruh langsung terhadap konsentrasi dan motivasi belajar siswa. Sekolah dengan fasilitas terbatas dinilai berpotensi menghambat proses pembelajaran, meski tenaga pendidiknya telah berupaya maksimal.

Rudi juga menyoroti faktor lingkungan sekolah yang kerap luput dari perhatian, seperti perundungan atau bullying. Menurutnya, kondisi psikologis siswa yang terganggu dapat berdampak langsung pada prestasi akademik, termasuk hasil TKA.

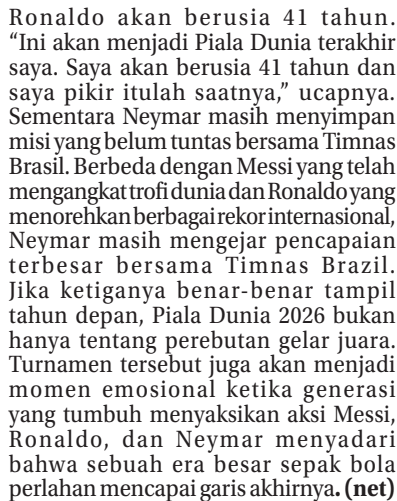
"Kita harus duduk bersama melihat

apa saja penyebabnya. Apakah anak-anak sudah merasa nyaman berada di sekolah untuk belajar, atau justru menghadapi tekanan di lingkungan pendidikan," katanya. BPMP Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah daerah, sekolah, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk tidak saling menyalahkan, melainkan berkolaborasi mencari solusi. Evaluasi sarana-prasarana, perbaikan iklim sekolah, dan penguatan kualitas pembelajaran dinilai perlu berjalan beriringan agar peningkatan mutu pendidikan di Gorontalo dapat tercapai secara berkelanjutan. (Tr-76)



Rudi Syaifullah

Panggung Terakhir Messi, Ronaldo, dan Neymar



Dari Krisis ke Harapan Besar di Piala Dunia 2026

Pelatih: Sebastián Beccacece



Warga Paris Tewas Ditikam

Cekcok Usai Pesta Miras di Bilato

GORONTALO-GP-Minuman Keras (Miras) merupakan minuman pembawa malapetaka dan butuh keseriusan aparat pemerintah dan penegak hukum untuk memberantasnya. Seperti insiden pembunuhan yang terjadi di Dusun Amper, Desa Lamahu, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo pada Senin (01/06/2026). Pria inisial IG alias Kalo (22) warga Dusun Bendungan, Desa Paris, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, tewas ditikam rekannya sendiri inisial YL alias Anang (24) saat pesta Miras bersama sejumlah rekan mereka yang lain. Peristiwa tragis ini terjadi sekitar pukul 18.00 wita.

Bermula ketika pelaku, YL, pulang ke rumahnya dalam kondisi dipengaruhi minuman keras (miras) dan marah-marah tanpa alasan yang jelas pada pukul 17.30 wita. Tak lama kemudian, pelaku keluar rumah. Merasa khawatir dengan kondisi suaminyanya yang mabuk miras

akan berbuat onar, DA (26) Istri pelaku, kemudian menyusul keluar dan mendapati pelaku tengah terlibat perkelahian dengan korban di depan rumah warga setempat. Dalam perkelahian tersebut, pelaku seketika menikam perut korban menggunakan senjata tajam hingga korban jatuh terkapar di tanah. Melihat korban bersimbah darah, pelaku panik dan mencoba menekan luka tusukan korban serta meminta bantuan warga untuk mencari kendaraan. Korban akhirnya dievakuasi menggunakan mobil pick up menuju Rumah Sakit Boliyohuto, namun nyawanya tidak tertolong setelah sempat dalam kondisi kritis dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 18.20 wita.

Kapolres Gorontalo AKBP Ki Ide Bagus Tri, SIK., melalui Kapolsek Boliyohuto, Iptu Nixon Amuntu, membenarkan adanya insiden berdarah tersebut dan menyatakan bahwa situasi di lokasi kejadian saat ini sudah kondusif. "Ya, benar telah terjadi peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan korban



Petugas kepolisian saat melakukan olah TKP sekaligus memasang garis polisi di lokasi kejadian penikaman di Dusun Amper, Desa Lamahu, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo pada Senin (01/06/2026).

meninggal dunia di wilayah hukum kami, tepatnya di Kecamatan Bilato," kata Iptu Nixon, Selasa (02/06). Lebih lanjut Iptu Nixon mengungkapkan, setelah menerima laporan, pihaknya langsung bergerak ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk

melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi serta mencari alat bukti lain. Selain itu pihaknya juga telah memasang garis polisi di TKP guna kepentingan proses lidik lebih lanjut. Diakui Iptu Nixon, tak butuh waktu lama pihaknya berhasil menangkap

YL alias Anang beserta barang bukti berupa sajam yang digunakan untuk menghabisi korban. Dari hasil penyelidikan awal yang disampaikan oleh Kapolsek bahwa pelaku dan korban sebelumnya diketahui sempat mengonsumsi minuman beralkohol bersama

tiga rekan lainnya di salah satu warung di Desa Bumela, Kecamatan Bilato, sebelum akhirnya terlibat cekcok yang berujung maut. Iptu Nixon juga sangat menyayangkan insiden ini kembali terjadi akibat pengaruh buruk konsumsi minuman keras. "Kami kembali menegaskan dan mengimbau keras kepada seluruh masyarakat untuk menjauhi minuman keras, karena sebagian besar tindak kriminalitas dan kekerasan bermula dari konsumsi miras yang tidak terkontrol," tegasnya. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Boliyohuto. "Kami juga meminta pihak keluarga korban maupun warga setempat untuk menahan diri, tidak melakukan aksi main hakim sendiri, dan mempercayakan penegakan hukum ini secara mutlak kepada pihak Polri. Kami pastikan proses hukum akan berjalan secara tegas, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku," tutup Iptu Nikson. (roy)



Salah seorang warga membuang sampah di jembatan gantung yang menghubungkan antara dua Kelurahan Biawu dan Kelurahan Biowao, Kota Selatan, Kota Gorontalo.

Jembatan Gantung Jadi Lokasi Pembuangan Sampah

GORONTALO-GP- Jembatan gantung yang menghubungkan Kelurahan Biawu dan Kelurahan Biowao, di Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, kini kondisinya kian memprihatinkan. Selain mengalami kerusakan fisik pada struktur bangunan, fasilitas penyeberangan ini juga beralih fungsi menjadi lokasi pembuangan sampah oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Pantauan Gorontalo Post Selasa (2/6), tumpukan sampah baik organik maupun non-organik tampak mengular di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS). Fenomena ini diperparah oleh penurunan debit air sungai yang drastis, sehingga fasilitas sampah tersebut tertahan, menumpuk, dan menimbulkan bau menyengat yang mengancam kesehatan masyarakat sekitar. Diduga warga di

bantaran sungai masih memiliki kesadaran yang rendah terhadap kelestarian lingkungan. Bahkan, beberapa warga dengan sengaja melempar kantong sampah langsung dari atas jembatan gantung tersebut.

Kondisi ganda yang meresahkan ini turut dikeluhkan oleh pengguna jalan. Jefri Amir salah seorang warga mengungkapkan, pemandangan kumuh ini sudah berlangsung lama. Menurutnya, masyarakat yang melintas tidak hanya dihantui oleh risiko penularan penyakit akibat aroma busuk, tetapi juga keselamatan fisik saat menyeberang.

"Setiap kali mau berangkat kerja, saya harus ekstra hati-hati. Selain bau sampah yang menyengat, papan lantai jembatan ini sudah banyak yang rapuh dan berlubang. Ini sangat membahayakan," keluh Jefri.

Ia menambahkan, ketiadaan fasilitas pembuangan yang memadai membuat area perbatasan kedua kelurahan ini menjadi tempat 'langganan' pembuangan sampah. Jika dibiarkan tanpa penanganan medis dan lingkungan, kawasan padat penduduk tersebut dikhawatirkan akan segera menjadi episentrum penyebaran penyakit menular.

Merespons kondisi yang kian tak terkendali ini, warga berharap adanya intervensi cepat dari Pemerintah Kota Gorontalo. Pemerintah diharapkan tidak hanya melakukan perbaikan pada infrastruktur jembatan yang rusak, tetapi juga mengedukasi warga serta menyediakan fasilitas tempat sampah terpilah (Organik dan non-organik) di sekitar pemukiman untuk memutus rantai kebiasaan buruk tersebut. (tha)

Ganggu Warga, Musik Volume Tinggi Dihentikan Polisi

GORONTALO-GP- Dianggap mengganggu kenyamanan warga. Pertunjukan musik dengan volume tinggi di Desa Ilotidea, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, dihentikan petugas kepolisian, Polsubsektor Tilango Polsek Telaga jajaran Polres Gorontalo Senin (01/06/2026) malam.

Kejadian ini bermula ketika warga Desa Ilotidea, Kecamatan Tilango mengadukan ke Call Center 110 sekitar pukul 21.45 wita perihal adanya aktivitas sekelompok orang yang memutar musik dengan suara yang sangat keras hingga larut malam, sehingga mengganggu waktu istirahat dan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi kejadian.

Usai menerima aduan, petugas gabungan langsung turun ke lapangan. Setibanya di lokasi, petugas mendapati laporan tersebut benar adanya.

Anggota piket Polsubsektor Tilango kemudian mengambil tindakan persuasif dengan menemui penyelenggara kegiatan. Petugas memberikan himbauan secara humanis namun tegas agar pemilik sound system segera menghentikan aktivitas yang memicu kegaduhan tersebut demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang



Petugas Kepolisian menghentikan music volume tinggi di Desa Ilotidea, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Senin (01/06/2026) malam.

kondusif. Ipda Erfin Idrus selaku Kapolsubsektor Tilango saat dikonfirmasi menyampaikan apresiasi aktif masyarakat yang memanfaatkan layanan Call Center 110 untuk melaporkan hal-hal yang mengganggu ketertiban umum. "Kami berterima kasih kepada warga yang telah melapor secara resmi melalui Call Center 110. Ini adalah bukti sinergi yang baik antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kamtibmas," kata Kapolsubsektor. Ipda Erfin Idrus juga mengingatkan

kepada seluruh warga di wilayah Kecamatan Tilango untuk saling menghormati hak kenyamanan bertetangga, terutama pada jam istirahat malam.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dalam melakukan aktivitas atau hiburan malam, tetap memperhatikan batasan waktu dan toleransi lingkungan sekitar. Jangan sampai niat mencari hiburan justru mengganggu kenyamanan tetangga yang sedang beristirahat," tandasnya. (roy)

RALAT PENGUMUMAN LELANG

Menunjuk Pengumuman kami pada Surat Kabar Harian Gorontalo Post Hari Selasa, 26 Mei 2026, terdapat kesalahan sehingga diperlukan Ralat Pengumuman Lelang Sebagai Berikut an. Rusmiyati Lihawa.

1. Rusmiyati Lihawa, berupa :
Sebidang tanah sawah sesuai SHM No. 101, LT : 3.302 m² a.n Rusmiyati Lihawa, terletak di Desa Tolite (dh. Batu Loreng), Kec. Boliyohuto (dh. Bongomeme), Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo.

Seharusnya menjadi :
1. Rusmiyati Lihawa, berupa :
Sebidang tanah sawah/pertanian sesuai SHM No. 101, LT : 3.302 m² a.n Rusmiyati Lihawa, terletak di Desa Tolite Kec. Bongomeme, Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo.

Makassar, 03 Juni 2026
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
Retail Asset Management X / Sulawesi & Maluku

Ttd
Ardiansa
Assistant Vice President

RALAT PENGUMUMAN

Menunjuk Pengumuman Kedua di Surat Kabar Harian "Gorontalo Post " tgl. 26 Mei 2026 pada uraian objek lelang No.1a kami ralat sebagai berikut:

Tertulis : Refto Djafar
1 (satu) bidang tanah seluas 139 M2, berikut bangunan rumah, dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya, di Perumahan Bumi Limboto Indah Kelurahan Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo. Di mana tertuang dalam SHM No. 00975/Hutuo, tercatat An. Refno Djafar.

Seharusnya : Refto Djafar
1 (satu) bidang tanah seluas 139M2, berikut bangunan rumah, dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya, di Perumahan Bumi Limboto Indah Kelurahan Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo. Di mana tertuang dalam SHGB No. 00975/Hutuo, tercatat An. Refto Djafar.

Demikian ralat ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Gorontalo, 03 Juni 2026
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Gorontalo

Ttd
Komang Wahyu Wedastra Putra
Pemimpin Cabang

Tambang Emas Pohuwato, Berkah atau Kutukan Sumber Daya Alam? Dari Enclave Ekonomi ke Pengukit Pertanian dan UMKM

DATA resmi BPS pada 5 Mei 2026 mencatatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo secara mengesankan tumbuh 7,68% dibanding triwulan 1 2025 (y-o-y). Menduduki peringkat 4 nasional dan berada jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, sebuah harapan baru menyeruak di Bumi Serambi Madinah. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha dan disokong oleh 3 besar lapangan usaha yaitu Pertambangan dan Penggalian yang merupakan kategori lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 31,34 persen; diikuti Industri Pengolahan sebesar 29,34 persen; serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,25 persen.

Sektor Pertambangan dan penggalian saat ini memang telah menjadi primadona pengerek pertumbuhan di Gorontalo dengan masuknya modal dalam jumlah besar dan mulai dihasilkannya produksi emas sehingga berdampak pada royalty yang akan diterima oleh Kas Pemda. Produksi emas perdana Tambang Emas Pani (Pani Gold Mine) di Kabupaten Pohuwato pada kuartal I tahun 2026 membawa dampak fiskal signifikan bagi Provinsi Gorontalo. Dengan cadangan 5,2 juta ounce emas dan investasi Rp18 triliun, royalty dari pertambangan emas diperkirakan mencapai Rp15-20 triliun selama 20 tahun melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) Mineral dan Batubara. Hingga April 2026, kontribusi Pani Gold ke Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mencapai Rp12-13 miliar.

Dengan estimasi produksi rata-rata 5 Ton per tahun saja (asumsi konservatif di bawah target produksi puncak yang mencapai 500 ribu ounce atau 15,5 ton per tahun) dapat diprediksi tak kurang dari Rp1,64 T/tahun akan masuk ke kas daerah hanya dari DBH , Pemprov Gorontalo bisa memperoleh Rp 263 M/tahun dan Pohuwato sebagai daerah penghasil bisa mendapatkan Rp 526 M/ tahun, dan kondisi ini apabila stabil dapat berjalan sampai dengan Tahun 2046 sesuai perkiraan umur produktif tambang. Ini adalah sumber pemasukan yang luar biasa, di tengah keterbatasan kapasitas fiskal Gorontalo dimana APBD provinsi Gorontalo TA 2026 hanya sebesar 1,54 T dan Kab Pohuwato hanya sebesar 861 Miliar,

adanya penambahan pendapatan Pemda dari sektor pertambangan ini mestinya adalah berkah yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Gorontalo. Tapi benarkah akan semudah itu? Benarkah dengan adanya tambang di sebuah wilayah maka serta merta akan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan bagi penduduknya? Akankah angka kemiskinan makin menurun? Akankah Angka rata-rata usia sekolah akan naik? Apakah otomatis tingkat pengangguran akan turun, pendapatan per kapita naik dan gini ratio mengecil?

Dalam literatur ilmu ekonomi, para ekonom mengenal fenomena *Natural Resource Curse* (NRC) atau Kutukan Sumber Daya Alam, di mana justru di negara atau daerah yang memiliki sumber daya alam ekstraktif besar seperti migas dan pertambangan mineral, justru tidak mengalami kemajuan signifikan dari sisi ekonomi, angka kemiskinan dan pengangguran stagnan, dan munculnya ancaman kerusakan alam yang masif. Ibarat pepatah bak ayam mati di lumbung padi. Fenomena ini bukan sekadar teori namun berkaca dari pengalaman negara-negara penghasil sumber daya alam besar seperti Venezuela yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia namun GDP nya stagnan sejak 2014 dan mengalami hiperinflasi atau negara-negara di Afrika seperti Nigeria yang kaya akan minyak namun mengalami korupsi besar-besaran, pendapatan minyak tidak diinvestasikan ke SDM dan infrastruktur, PDB stagnan selama 40 tahun. Kongo yang kaya akan Kobalt, emas dan tembaga namun 80% rakyatnya miskin.

Di Indonesia secara negara memang tidak termasuk yang mengalami NRC, namun secara provinsi kita melihat Kalimantan Timur yang kaya akan batu bara dan migas, memiliki PDB yg tinggi namun IPM nya di bawah Jawa Tengah, ketimpangan tinggi, perekonomian 70% tergantung tambang sehingga saat harga batu bara jatuh di 2022-2023 pertumbuhan ekonomi ikut anjlok. Kita juga melihat Papua, Freeport menghasilkan devisa besar, tapi Kabupaten Mimika sebagai lokasi pertambangan memiliki IPM terendah nasional, konflik berkepanjangan antara



Oleh :
Arie Suwandani

masyarakat adat dan perusahaan tambang serta tingginya ketergantungan terhadap hasil tambang menyebabkan rendahnya upaya diversifikasi pendapatan daerah.

Mengapa ini bisa terjadi? Ada banyak faktor mulai dari soal tata kelola hasil tambang sampai perkara korupsi. Namun secara umum kita harus memahami bahwa sektor pertambangan adalah enclave economy, yaitu ekonomi yg bersifat “enclave” atau “tertutup”, ini ditandai dengan nature investasi pertambangan yang padat modal, dan aliran dana sebagian besar keluar, masyarakat sekitar tidak serta merta mendapatkan manfaat. Tidak otomatis bisa merekrut pegawai dari warga, dan tidak ada transaksi ekonomi juga dengan sekitar karena mayoritas pasokan logistik didatangkan dari luar karena alasan efisiensi. Imbas lainnya dari bergeliatnya pertambangan adalah muncul inflasi harga di daerah pertambangan yang harus ditanggung oleh masyarakat yang justru tidak menikmati secara langsung hasil pertambangan. Belum lagi ongkos yang harus ditanggung karena kerusakan alam dan konflik antara penambang tradisional dan perusahaan besar.

Di sisi SDM munculnya sektor pertambangan yang booming menghasilkan pendapatan dapat berdampak pada terjadinya perubahan *mindset* generasi muda yang tidak lagi berminat menekuni

sektor di luar pertambangan, bahkan enggan sekolah karena terlanjur menikmati mudahnya uang dari menambang, dalam jangka panjang hal ini akan berdampak serius pada kualitas SDM di masa depan. Karena itu butuh intervensi kebijakan yang komprehensif dari Pemerintah Daerah agar semua eksternalitas negatif ini dapat dikendalikan dan kehadiran tambang benar-benar menjadi berkah kemakmuran.

Apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah?

Tak semua SDA berakhir menjadi kutukan, di beberapa negara dan daerah, sumber daya alam berhasil dikelola dengan baik dan mendatangkan kemakmuran bagi masyarakatnya. Di level negara kita mengenal Norwegia yang berhasil mengubah sumber daya alam minyak dan gas di Laut Utara menjadi investasi global yang mendatangkan pendapatan per kapita 89 ribu dolar per tahun dan Indeks Pembangunan Manusia 5 besar dunia. Pemerintah Norwegia pada tahun 1990-an membentuk *Norwegian Government Pension Fund* yang saat ini telah berjumlah lebih dari 1,7 Triliun Dollar, dana tersebut adalah seluruh royalty tambang yang dijadikan dana investasi luar negeri, bukan masuk ke APBN langsung. Selain itu ada transparansi tinggi atas pengelolaan pertambangan, semua kontrak minyak dipublikasikan. Di level daerah/ negara bagian ada Alaska yang membuat Alaska Permanent Fund sejak tahun 1976, 25% royalty minyak masuk ke dana investasi. Tiap tahun rakyat negara bagian Alaska menerima dividen langsung per kepala sebesar 1.000-3.000 dolar. Alhasil kemiskinan rendah, infrastruktur jalan dan SDA langsung dirasakan oleh rakyat, bukan hanya orang-orang yang memiliki privilege atas SDA.

Kembali lagi ke tambang emas Pohuwato, apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah? Bukankah hasil royalty masih relatif kecil? Baru 15 M dalam satu triwulan. Memang benar saat ini masih kecil, namun saat ini masih di tahap paling awal, apabila kapasitas produksi bisa mencapai titik optimal yang diperkirakan terjadi pada tahun 2028, royalty yang dihasilkan dapat menyentuh minimal

1,5 T per tahun yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Penghasil dan Kabupaten lain dalam satu provinsi. Pemerintah Daerah perlu bersiap-siap dengan mengambil kebijakan di antaranya memanfaatkan berkah sumberdaya alam ini yaitu:

Transparansi Royalti, Pemerintah Daerah dapat secara proaktif mengumumkan berapa royalty yang diperoleh dan digunakan untuk apa saja. Langkah ini penting untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus meminimalkan risiko korupsi dan salah kelola dana agar tidak digunakan untuk kebutuhan yang tidak produktif dan bersifat mercusuar.

Hilirisasi Lokal, mendorong pembangunan fasilitas pengolahan di daerah sehingga hasil yang dikirim memiliki nilai tambah lebih tinggi, bukan sekadar mengirim bahan mentah ke kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Mengoptimalkan peran UMKM sebagai pemasok logistik bagi perusahaan tambang besar sehingga manfaat ekonomi pertambangan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat sekitar dan mengurangi dampak enclave ekonomi.

Menertibkan PETI (Penambang Tanpa Izin) secara berimbang, disertai pemberian insentif yang menarik untuk mendorong alih status menjadi penambang berizin. Pendekatan ini tidak hanya menegakkan regulasi tetapi juga membuka peluang baru bagi PAD melalui retribusi dari penambang rakyat yang langsung masuk ke kas Pemda.

Semua ini bukan perkara mudah —dibutuhkan kesiapan institusi, keberanian politik, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun satu hal yang pasti: pemasukan dari sektor pertambangan harus diperlakukan sebagai dana pengungkit bagi sektor unggulan dan investasi SDM, bukan dihambur-hamburkan pada proyek mercusuar atau menguap tanpa bekas. Pertanyaannya bukan lagi apakah tambang emas Pohuwato adalah berkah atau kutukan — melainkan apakah kita cukup mampu untuk menjadikannya berkah sejati bagi seluruh rakyat Gorontalo. (*)

Penulis adalah Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

Optimalisasi Manajemen SDM Pendidikan: Mitigasi Burnout Tenaga Pendidik di Tengah Arus Digitalisasi

Abstrak

AKSELERASI teknologi dalam sektor pendidikan menciptakan kontradiksi antara efisiensi operasional dan peningkatan beban psikologis bagi tenaga pendidik. Artikel ini menganalisis fenomena *burnout* yang dipicu oleh tuntutan konektivitas tanpa batas (*hyperconnectivity*) serta perluasan tanggung jawab pengajar di ruang digital. Dengan menggunakan perspektif manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), kajian ini merumuskan solusi holistik yang mencakup ranah individu, organisasional, hingga kebijakan publik. Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan kesehatan mental pendidik merupakan pilar utama dalam menjaga keberlanjutan kualitas pendidikan nasional.

Pendahuluan

Transisi menuju ekosistem pendidikan berbasis digital telah melahirkan lanskap kerja yang penuh dinamika sekaligus tantangan. Di satu sisi, adopsi teknologi menawarkan fleksibilitas dan efektivitas dalam proses pedagogis. Namun di sisi lain, perubahan ini memicu beban kerja baru yang belum pernah dihadapi oleh generasi pendidik sebelumnya. Saat ini, guru dituntut tidak hanya menguasai substansi ajar, tetapi juga wajib terampil mengelola infrastruktur digital dan tetap

responsif terhadap komunikasi daring meskipun di luar jam dinas.

Akumulasi beban yang tidak terkelola dengan sistem manajemen yang tepat berisiko memicu *burnout* suatu kondisi kelelahan kronis yang merusak kesejahteraan personal sekaligus mendegradasi kualitas layanan pendidikan. Isu ini tidak boleh dianggap sebagai keluhan individu semata, melainkan masalah sistemik dalam tata kelola SDM pendidikan. Mengingat penurunan kualitas emosional pendidik berdampak langsung pada pengalaman belajar siswa, maka strategi mitigasi *burnout* menjadi investasi krusial bagi keberhasilan pembangunan manusia di masa depan.

Pembahasan Dampak Hyperconnectivity dan Realitas Pendidik

Salah satu ciri utama era digital adalah *hyperconnectivity*, di mana batas antara ruang profesional dan privat menjadi semakin kabur. Pendidik sering kali merasa tertekan oleh ekspektasi untuk selalu “aktif”, mulai dari pembaruan berkala pada sistem manajemen pembelajaran (LMS) hingga merespons pesan wali murid di waktu istirahat. Riset menunjukkan bahwa adaptasi digital yang dilakukan tanpa persiapan matang secara signifikan meningkatkan level stres, khususnya pada

Oleh :
Dr.Arifin Sukung, S.Pd., M.Pd,
Ni Wayan Sridewi,
Sridela R. Tamrin,
Syahdalia Abas,
Apriyanto Mandalima,
Lidya D. Luku

dimensi kelelahan emosional dan sinisme terhadap profesi.

Kontekstualisasi Tantangan Guru di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, fenomena ini diperparah oleh beberapa faktor unik:

- **Beban Administrasi Digital:** Selain tugas mengajar, guru diwajibkan mengisi berbagai platform kementerian seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM), e-Kinerja, dan Dapodik secara mandiri. Kendala teknis pada server sering kali memaksa guru bekerja lembur di luar jam sekolah.

- **Budaya Komunikasi Grup WhatsApp:** Penggunaan grup pesan instan yang masif menciptakan tekanan sosial untuk selalu siap siaga 24/7. Hal ini membuat kebijakan hak untuk memutus koneksi (*right to disconnect*) sulit diterapkan secara efektif.

- **Kesenjangan Infrastruktur:** Guru di daerah 3T atau pengajar senior sering

mengalami *technostress* akibat tuntutan digitalisasi yang tidak disertai pelatihan memadai atau akses internet yang stabil.

- **Prekursor Kesejahteraan:** Beban kerja digital yang tinggi sering kali tidak selaras dengan tingkat kesejahteraan finansial, terutama bagi guru honorer, sehingga mempercepat laju kelelahan mental.

- **Strategi Intervensi Manajemen SDM** Untuk menekan angka *burnout*, diperlukan kerangka kerja manajemen SDM yang mencakup tiga tingkat intervensi:

- **Level Individu:** Membekali pengajar dengan literasi kesehatan mental dan teknik manajemen batas digital (*digital boundaries*). Dukungan berupa otonomi kerja terbukti efektif mereduksi tekanan akibat beban tugas yang berlebihan.

- **Level Institusi:** Lembaga pendidikan perlu mengadopsi budaya kerja yang empatik, termasuk penerapan regulasi *right to disconnect* bagi pengajar. Otomasi tugas administratif juga penting agar fokus utama guru kembali pada esensi pedagogis.

- **Level Kebijakan:** Pemerintah harus mengintegrasikan kesehatan mental pendidik ke dalam standar mutu pendidikan dan kriteria akreditasi lembaga. Selain itu, kepemimpinan sekolah yang empatik menjadi faktor kunci dalam menjaga iklim

kerja yang kondusif.

Kesimpulan

Kelelahan kerja (*burnout*) pada pendidik di era digital merupakan tantangan manajemen SDM yang mendesak untuk ditangani. Faktor penyebab yang kompleks memerlukan solusi sistemik dan berkelanjutan. Menjamin kesejahteraan pendidik bukanlah sekadar pilihan, melainkan prasyarat mutlak bagi terciptanya generasi unggul. Langkah strategis melalui kebijakan yang inklusif dan budaya kerja yang manusiawi akan menjadi penentu keberhasilan transformasi digital pendidikan di Indonesia.

Daftar Pustaka
Hakanen, J. J., Bakker, A. B., & Jokisaari, M. (2011). A 35-year follow-up study on burnout among Finnish employees. *Journal of Occupational Health Psychology*, 16(3), 345-360.
Sokal, L., Trudel, L. E., & Babb, J. (2020). Canadian teachers’ attitudes toward the work and efficacy beliefs during the first wave of the COVID-19 pandemic. *International Journal of Educational Research Open*, 1, 100016. (*)

Penulis adalah dosen pembimbing, dan mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan, FIP, UNG

HARIAN PAGI PERTAMA DAN TERBESAR DI GORONTALO

GORONTALO Post

Penerbit : PT. GORONTALO CEMERLANG
Pembina : Dahlan Iskan
Komisaris Utama : Imawan Mashuri
Komisaris : Urief Hasan
Direktur Utama : Moh. Sirham
Direktur : Haryono
Direktur Marketing : Hariyanto Hamzah

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Jitro Paputungan

■ DIVISI PRODUKSI

Redaktur Pelaksana: Roy Tilameo, Rahmat Malik.
Redaktur: Zulkifli Tampolo. **Staf Redaksi:** Deice Pomalingo, Caisar Ntoma, Diyanti T. Niyode, Sekretaris Redaksi: Agustina Said. **Koordinator HRD:** Chicilia Novistiuti Arifin. **Koordinator IT:** Aslan Akuba

■ DIVISI ART & PERWAJAHAN

Risdiyanto Karim, Nasir Hantono, Apri Ahmad. **Design Grafis:** Muhammad Syukri

■ DIVISI USAHA

Manager Keuangan: Elvin Ambo. **Adriyanti Kadir (adm).** **Manager Iklan:** Hariyanto Hamzah.

Staf Iklan: Aminum Humola, Surya Muhamad **Design Iklan:** Oman Nasiboe.

Manager Sirkulasi & Pemasaran: Yusuf Saleh. **Pemasaran Koran:** Buyung Tanjung, Yersi Ismail, Welniaty Ahaya (adm).

■ LAYANAN PELANGGAN DAN IKLAN

Tarif Iklan: Umum Rp. 30.000,-/mmk (hitam putih/BW), Rp 40.000,-mmk (berwarna/FC). **Mungil:** Rp 35.000 (satu kali muat). **Advertorial:** Rp 22.500,-mmk (berwarna), Rp 15.000,-mmk (hitam putih/BW). **Harga Langganan Koran:** Rp 150.000 (luar kota tambah ongkos kirim)

■ ALAMAT

Kantor Pusat: GEDUNG GRAHA PENA GORONTALO
Jln. Jhon A. Katili (Eks Jln. Andalas). No. 144 Kota Gorontalo. Telepon: (0435) 827551.
E-mail Redaksi: redaksi_gp@yahoo.com, redaksi.gpost@gmail.com, Hargo.co.id.
E-mail Iklan: iklan_gp@yahoo.com, iklangp@yahoo.com. E-mail Sirkulasi & Pemasaran: marketing_gp@ymail.com.

Perwakilan Jakarta: Jln. Kebayoran Lama no. 12 Jakarta Barat.
Surabaya: Jln Ketintang Permai, Blok BD No. 17, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Aleg Mutawassir Gelar Sunatan Massal untuk 40 Anak

TILONGKABILA-GP- Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, Mutawassir, menggelar kegiatan sunatan massal bagi 40 anak yang dipusatkan di Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan dalam rangkaian momentum Hari Raya Idul Adha dan mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Mutawassir mengatakan, kegiatan sunatan massal tersebut merupakan program Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten Bone Bolango yang secara kebetulan juga dipimpinnya sebagai Ketua KKSS. Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat sekaligus upaya mempererat kebersamaan di tengah momentum Idul Adha.

Ia menjelaskan, KKSS Bone Bolango saat ini beranggotakan sekitar 500 kepala keluarga. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya keluarga yang ingin mengikutsertakan anak-anak mereka dalam program sunatan massal. Peserta yang mengikuti kegiatan berasal dari kalangan umum dengan rentang usia sekitar 1,6 tahun hingga 10 tahun.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, sebanyak 20 petugas dari Tim Relawan Nusantara diterjunkan untuk menangani proses sunatan. "Dengan dukungan para relawan tersebut, alhamdulillah kegiatan berlangsung sebagai bagian dari komitmen sosial yang diinisiasi bersama KKSS Bone Bolango dalam memberikan pelayanan dan kontribusi kepada masyarakat," ujarnya.(csr)



ALEG Mutawassir menggelar kegiatan sunat massal.



(FOTO HUMAS) KETUA DPRD Bonbol hadir diupacara peringatan hari Pancasila tingkat Kabupaten Bone Bolango yang baru digelar kemarin.

Hari Pancasila Momentum Menguatkan Persatuan

Faisal Yunus Mengajak Seluruh Elemen Masyarakat Merefleksikan Nilai Filosofis dan Historis Pancasila

TILONGKABILA-GP- Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango, Faisal Yunus, mengajak masyarakat untuk merefleksikan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum menguatkan persatuan. Menurutnya, peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi agenda seremonial semata, tetapi juga harus dimaknai sebagai pengingat akan pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Faisal Yunus mengatakan bahwa Pancasila merupakan sumber kekuatan moral dan spiritual bangsa Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila telah menjadi pemersatu bangsa yang mampu menjaga keberagaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus terus dijaga, dipahami, dan diamalkan oleh seluruh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali untuk menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai inspirasi dalam berdemokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu mendalami nilai filosofis dan historis dari kelahiran Pancasila sebagai ideologi, dasar negara, sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia.

Pemahaman tersebut penting agar nilai-nilai Pancasila dapat terus hidup dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan.

Dengan pemahaman yang kuat terhadap Pancasila, lanjutnya, seluruh pihak diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam menghadapi berbagai tantangan daerah ke depan. Semangat persatuan yang berlandaskan Pancasila diyakini dapat menjadi modal penting untuk mewujudkan daerah yang lebih maju dan lebih baik.

"Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi inspirasi dalam berdemokrasi dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila untuk menguatkan persatuan di tengah kondisi saat ini untuk maju dan lebih baik lagi," ujarnya. (csr)

Pedro Bau Apresiasi Diklat Wasit Lisensi C3 di Bone Bolango

TILONGKABILA-GP- PSSI Kabupaten Bone Bolango bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Bone Bolango melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Wasit Sepak Bola Lisensi C3. Kegiatan yang diikuti sebanyak 30 peserta dengan rata-rata berusia 17 tahun ke atas tersebut dilaksanakan selama enam hari di Hotel Toewawa dan dibuka pada Selasa (2/6).

Wakil Ketua DPRD Bone Bolango, Zainudin Pedro Bau, menyampaikan rasa syukurnya karena setelah beberapa tahun tidak menggelar pelatihan wasit, kini Bone Bolango kembali melaksanakan Diklat Wasit Lisensi C3 pada masa kepemimpinan Bupati

Ismet Mile. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi langkah positif dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang olahraga, khususnya sepak bola.

Pedro Bau yang juga menjabat sebagai Ketua PSSI Bone Bolango berharap dukungan Pemerintah Daerah terhadap kegiatan-kegiatan pembinaan olahraga seperti ini dapat terus berlanjut. Ia menilai pelatihan wasit Lisensi C3 memiliki manfaat yang sangat besar mengingat selama ini Bone Bolango cukup aktif menggelar berbagai turnamen sepak bola, namun masih dihadapkan pada kendala keterbatasan jumlah wasit yang memiliki kompetensi dan lisensi resmi.

Ia menegaskan, melalui pelatihan tersebut diharapkan lahir wasit-wasit yang handal, profesional, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya di lapangan. "Kami memberi perhatian dan apresiasi kepada semua pihak yang terus mendorong lahirnya wasit-wasit yang handal dan profesional. Sebab selama ini Bone Bolango banyak kegiatan tetapi kekurangan wasit, padahal daerah ini sangat ramai dengan kegiatan sepak bola. Apalagi sudah beberapa tahun tidak melahirkan wasit, namun di zaman Bupati Ismet Mile sekarang ini alhamdulillah kembali terlaksana. Mari membawa Bone Bolango juara di tangan Bupati Ismet Mile," ujarnya. (csr)



WAKIL ketua Zainudin Pedro Bau hadir dipembukaan pelatihan diklat wasit lisensi c3 Bonbol kemarin.

SANJUNG MEGAWATI SEBAGAI NEGARAWAN

Waketum Gerindra Sindir Dino Patti Djalal

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Habiburokhman menyanjung sikap Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, karena memberi penghormatan ke Presiden RI Prabowo Subianto. Hal demikian dikatakan Habiburokhman menyikapi momen Megawati bergandengan tangan dengan Presiden RI Prabowo Subianto. "Bu Mega (Megawati, red) itu walaupun di partainya di luar pemerintahan, tetap menunjukkan sikap yang elegan sebagai negarawan," kata dia ditemui di kompleks parlemen,

Senayan, Jakarta, Selasa (2/6).

Habiburokhman menganggap penghormatan Megawati kepada Prabowo tetap tinggi, meski kader PDIP mengkritisi kebijakan pemerintah. "Bu Mega-nya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya," kata dia. Menurut Habiburokhman, sikap Megawati yang mencegah polarisasi berbeda jauh dengan eks Wamenlu Dino Patti Djalal yang memanasakan iklim politik.

"Ini contoh kebalikannya dari yang ditunjukkan Pak Dino," kata

dia. Habiburokhman mengatakan Gerindra menghormati sikap Megawati saat menggandeng Prabowo dalam peringatan Hari Lahir Pancasila. "Kami sangat hormat, ya, kami sangat respek contoh yang dilakukan oleh Ibu Mega ini," katanya.

Habiburokhman sendiri mengatakan hubungan Prabowo dengan Megawati tetap baik meski PDIP tak berada di luar pemerintahan. "Beliau-beliau masih menjalin komunikasi yang amat baik di level paling tinggi itu menjalin komunikasi yang

amat baik," katanya. Sebelumnya, Prabowo dan Megawati terekam bergandengan tangan saat menghadiri Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin (1/6) kemarin. Momen itu terjadi usai upacara selesai dilaksanakan. Prabowo yang menjadi inspektur upacara langsung menyalami sejumlah pejabat yang hadir. Prabowo lantas menghampiri Megawati dan Wapres kesepuluh RI Jusuf Kalla dan Wapres ke-13 RI Ma'ruf Amin. Setelah berbincang dengan JK dan Ma'ruf, Prabowo mempersilakan Megawati untuk berjalan lebih dahulu ke sebuah

lorong gedung acara. Namun, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu menolak dengan meminta Prabowo berjalan lebih dahulu.

Keduanya seperti gesture yang terlihat malah saling mempersilakan berjalan lebih dahulu. Megawati kemudian berinisiatif bergerak, sembari memberikan tangannya ke arah Prabowo. Prabowo menyambut uluran tangan Megawati. Keduanya pun berjalan bersama seraya bergandengan tangan ke sebuah lorong gedung acara. (jppn)

